Prioritas Pembangunan Sanitasi Dalam Pemanfaatan Dana Desa

Dr. SUPRAPEDI, M.Eng
Direktur Pendayagunaan SDA dan TTG
Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kick-off **Nasional Program PPSP 2017**

Bappenas, 15 Maret 2017

Program Untuk Mendukung Nawacita :

Visi : Terwujudnya Indonesia yg berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Gotong Royong

Nawacita ke-3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan

Program Aksi ke-8 : Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa

Mendukung Arah Kebijakan ke-2 : Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa

Mendukung Arah Kebijakan ke-7 : Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota

SANDINGAN SASARAN RPJMN 2015-2019, NAWAKERJA PRIORITAS, PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN

Indikator	2014 (Baseline)	2019
Pembangunan Perdesaan		
• **Penurunan desa tertinggal sampai dgn 5.000 Desa**	36.531 desa tertinggal (2011)	31.531 desa tertinggal
• **Peningkatan desa mandiri (paling sedikit 2.000 desa)**	2.294 desa mandiri (3013)	4.924 desa mandir
Pengembangan Kawasan Perbatasan		
• Pengembangan Pusat Ekonomi perbatasan (pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)	3 (111 lokasi prioritas)	10 (187 lokasi prioritas)
• Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	92 pulau kecil terluar/terdepan

Nawakerja Prioritas	Program/Kegiatan Unggulan
1. Peluncuran "Gerakan Desa Mandiri" di 5000 desa pada tahun 2015 2. Pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur di 5000 desa pada tahun 2015 3. Pembentukan dan pengembangan 5000 BUMDes 4. Revitalisasi pasar desa di 5000 desa/kawasan perdesaan 5. Pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5000 desa mandiri 6. Penyiapan implementasi penyaluran desa-desa Rp. 1,4 M per desa secara bertahap 7. Penyaluran modal bagi koperasi/UKM di 5000 Desa 8. Pilot Project sistem pelayanan Publik jaringan koneksi online di 5000 desa 9. "Save Village" di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil	1. Mengawal implentasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui penyusunan 16 Peraturan Menteri sesuai amanah UU Desa; 2. Memberdayakan desa melalui pendampingan pemerintah, lembaga desa dan masyarakat desa dengan menyediakan tenaga pendamping 88.000 orang ; 3. Membangun fasilitas pendidikan dasar di seluruh desa/kawasan perdesan di seluruh daerah terpencil, perbatasan dan tertinggal sesuai standar pelayanan minimum; **4. Membangun fasilitas kesehatan dasar di seluruh desa/kawasan perdesaan di seluruh daerah terpencil, perbatasan dan tertinggal sesuai standar pelayanan minimum;** 5. Membangun fasilitas pemasaran di seluruh desa/kawasan perdesaan di seluruh daerah terpencil, perbatasan dan tertinggal sesuai standar pelayanan minimum; **6. Mewujudkan 5.000 desa di Indonesia menjadi Desa Mandiri hingga 2019;** **7. Melakukan pencanangan 1000 desa berdaulat benih hingga 2019.**

MATRA PEMBANGUNAN DESA

INOVASI MENUJU KEMANDIRIAN DESA

1 JARING KOMUNITAS WIRADESA (JAMU DESA)

Penguatan daya dan ekspansi kapabilitas masyarakat desa

KEGIATAN PRIORITAS:

1. Pembentukan Balai Rakyat;
2. **Promosi Kesehatan Berbasis Komunitas;**
3. Perpustakaan/Internet Desa/ Pengembangan Informasi/ Publikasi;
4. Kewirausahaan (Pelatihan, Fasilitasi, dan Inkubasi);
5. Fasilitasi Desa Inklusif (Ramah terhadap kaum difabel).

2 LUMBUNG EKONOMI DESA (BUMI DESA)

Optimalisasi sumber daya Desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan dan ketahanan energi

KEGIATAN PRIORITAS:

1. Desa Wisata (Religi, Budaya dan Bahari), Desa Mandiri Energi;
2. Fasilitasi dan penyediaan teknologi tepat guna;
3. Inisiasi: a) Desa *Agrotechnopark,* b) Industri berbasis Organik;
4. Pemberdayaan Kelompok Perempuan Wirausaha (PERWIRA);
5. Penguatan dan Pengembangan BUMDesa

3 LINGKAR BUDAYA DESA (KARYA DESA)

Partisipasi masyarakat desa sebagai kerja budaya

KEGIATAN PRIORITAS:

1. Pemberdayaan masyarakat hukum adat;
2. Penyusunan almanak desa;
3. Festival budaya desa;
4. **Pemetaan budaya desa partisipatif;**
5. Pembentukan Lembaga Mediasi Desa.

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
(Berdasarkan Permendes No.22 Tahun 2016)

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENAGAN LOKAL BERSAKALA DESA

PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PENGEMBANGAN PROGRAM AMPL

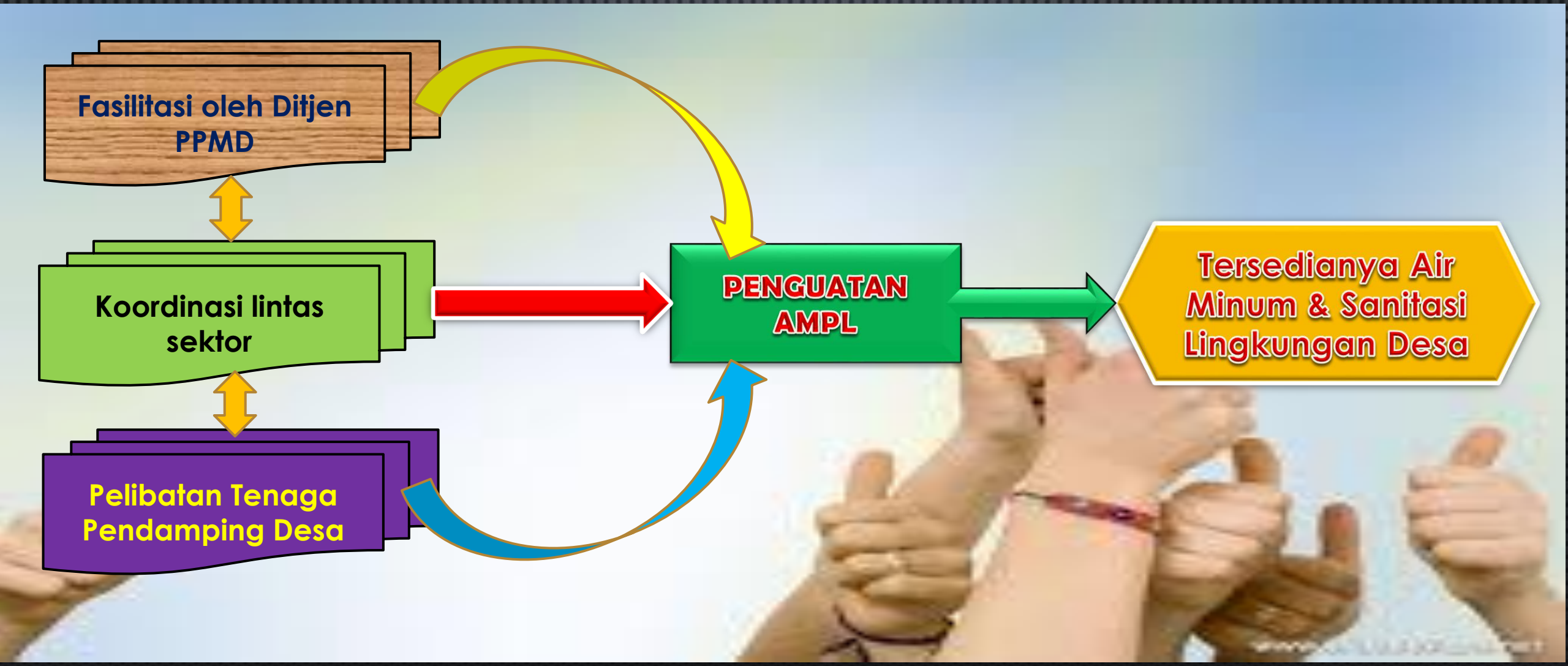

PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN

Pendampingan dan pembinaan dilakukan bagi masyarakat dengan **tujuan meningkatkan akses air bersih dan sanitasi lingkungan secara berkelanjutan**

Tujuannya adalah meningkatnkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam proses **pengelolaan sumber daya air dan lingkungan**

PEMBERDAYAAN PERLU PENDAMPINGAN

AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

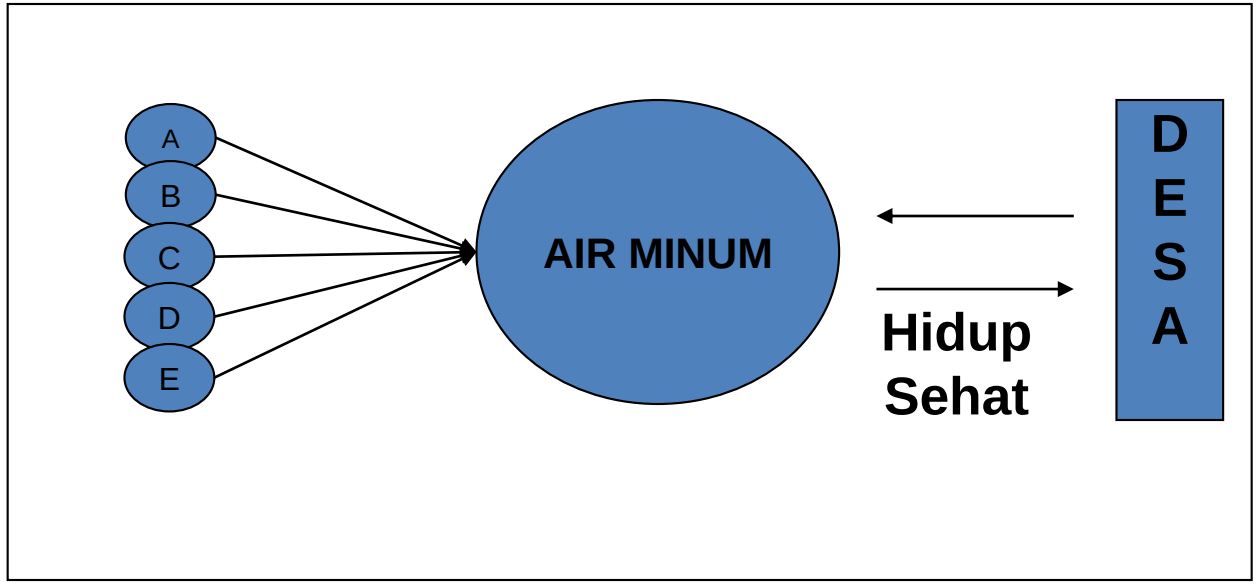

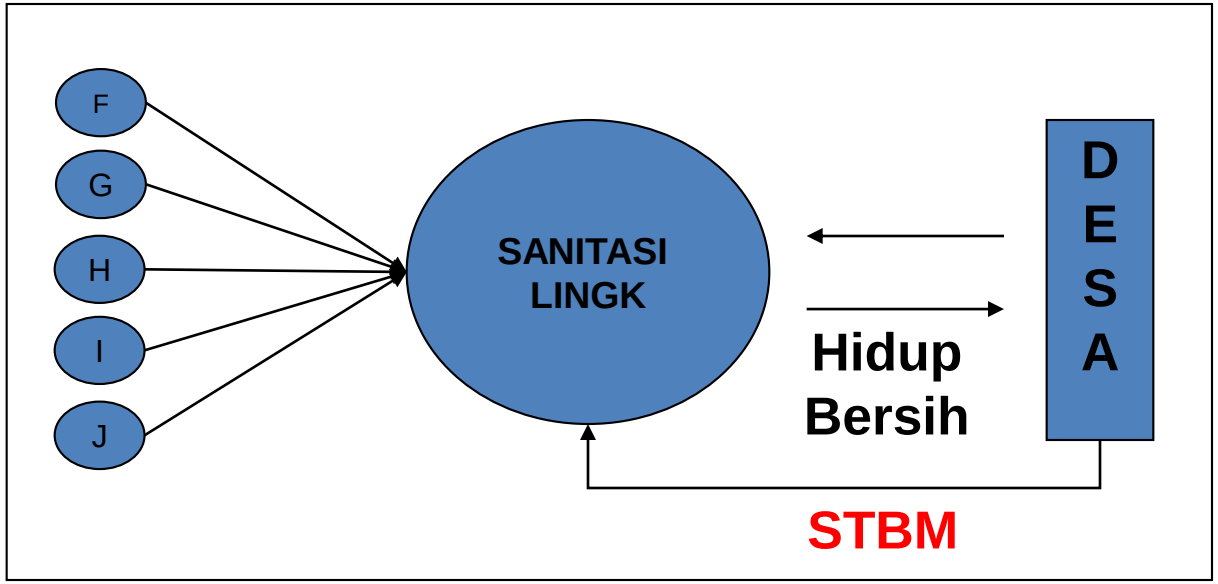

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

SISTEM PERUBAHAN PERILAKU

SIPPERDES :

STRATEGI INTERVENSI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERBASIS TIPOLOGI DESA

Studi Kasus :

1. Desa Bidari Tanjung Datuk, Indagiri Hilir
2. Desa Ulak Patian, Rokan Hulu

Data mining for knowledge extraction

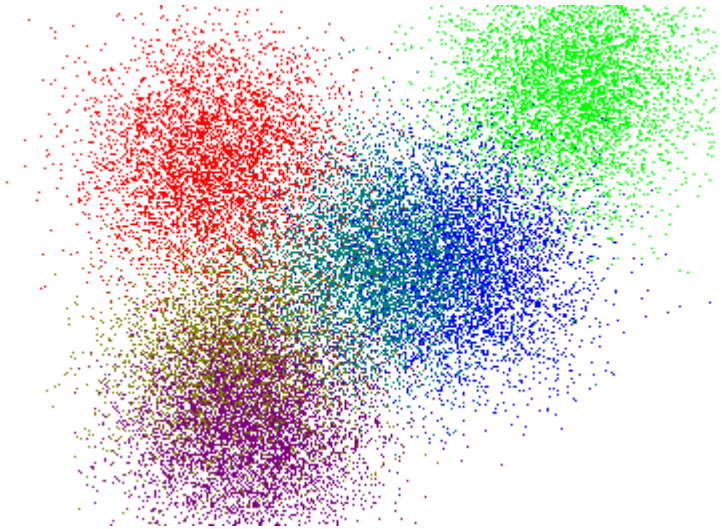

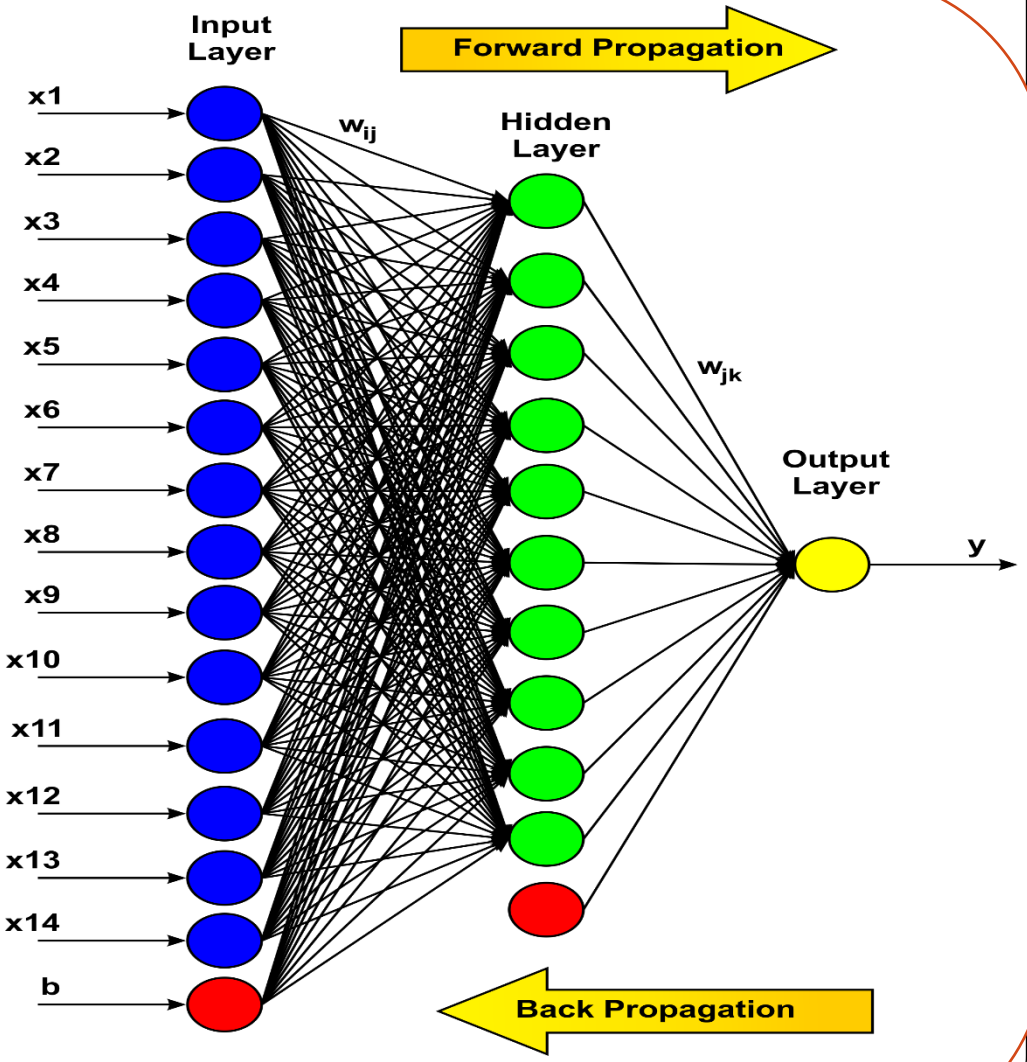

Neural Network

*Clustering - **Riau***

Dengan menggunakan data potensi desa pada di Provinsi Riau yang terdiri dari 1592 desa, akan dikelompokkan kedalam 5 status desa yaitu *Cluster 1 (Desa Mandiri)*, *Cluster 2 (Desa Maju)*, *Cluster 3 (Desa Berkembang)*, *Cluster 4 (Desa Tertinggal)* dan *Cluster 5 (Desa Sangat Tertinggal)*

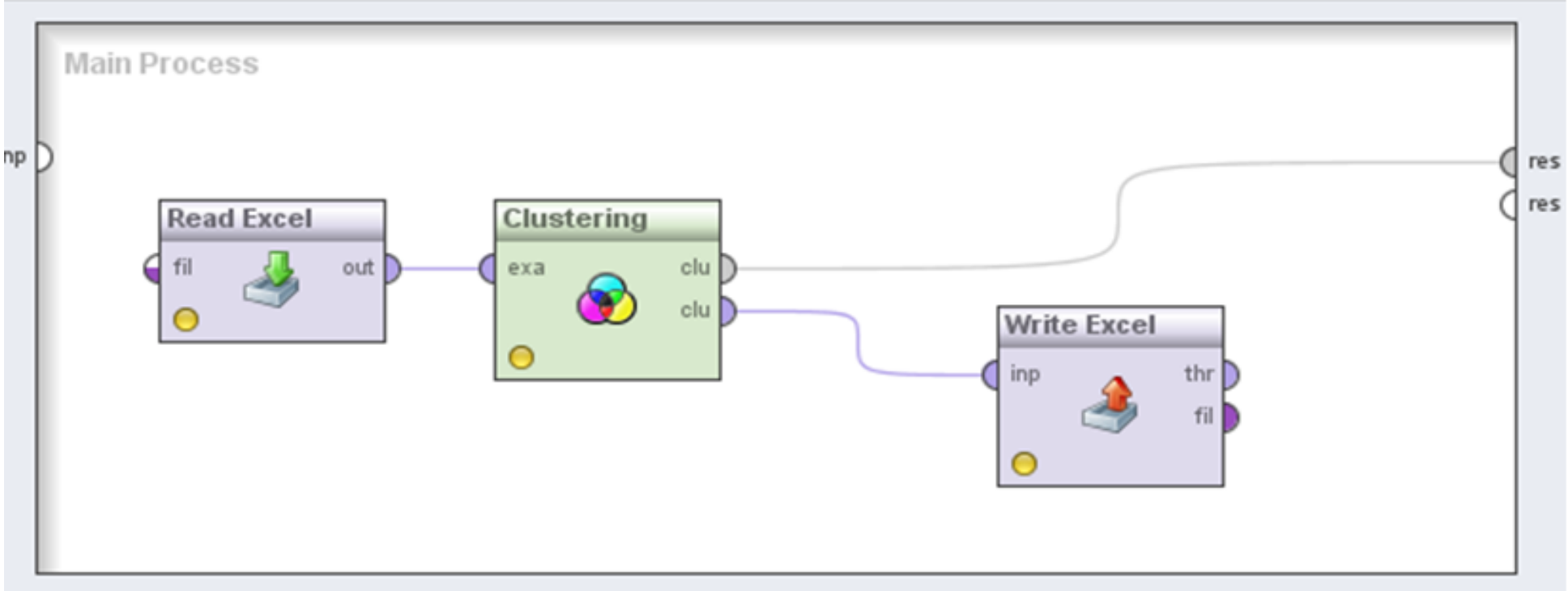

Dari 1592 desa diperoleh 5 status desa

- Cluster 1: 367 Desa (Mandiri)
- Cluster 2: 406 Desa (Maju)
- Cluster 3: 311 Desa (Berkembang)
- Cluster 4: 196 Desa (Tertinggal)
- Cluster 5: 312 Desa (Sangat Tertinggal)

- **Sehingga diketahui**

Desa	Kecamatan	Kabupaten	Status
Bidari Tanjung Datuk	Mandah	Indragiri Hilir	Tertinggal
Ulak Patian	Kepenuhan	Rokan Hulu	Tertinggal
Sokoi	Kuala Kampar	Pelalawan	Tertinggal

Bagaimana strategi meningkatkan status desa dari Desa *Tertinggal* menjadi Desa *Mandiri* ?

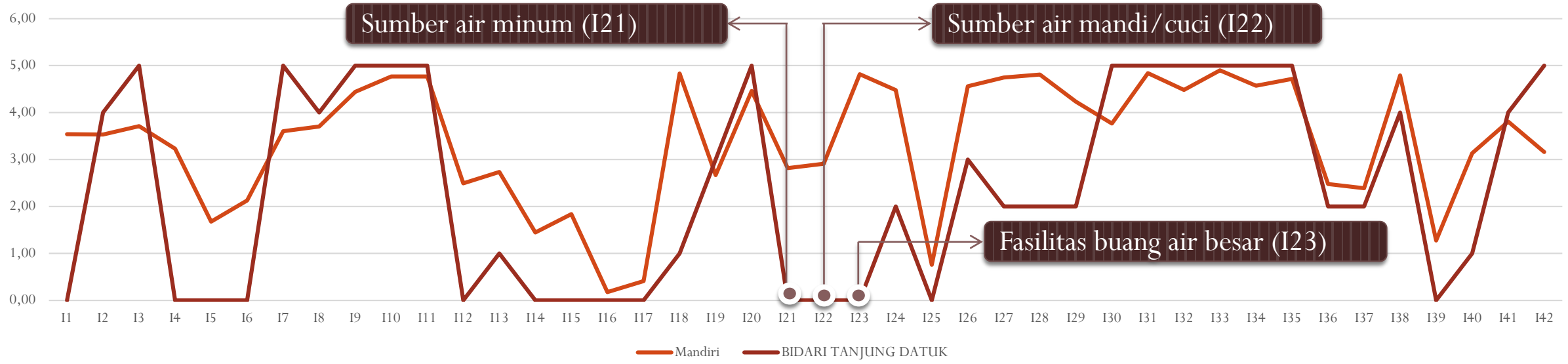

	I1	I2	I3	I4	I5	I6	…	I21	I22	I23	…	I41	I42
Mandiri	3.54	3.53	3.71	3.23	1.68	2.13	…	**2.82**	**2.91**	**4.82**	…	3.81	3.16
BIDARI TANJUNG DATUK	.0	4.0	5.0	.0	.0	.0	…	**.0**	**.0**	**.0**	…	4.0	5.0

❖ **Dengan Analisa GAP :**

$$di,j(Ci,j\ ,Vi,j) = C_{i,j} - V_{(i+n),j}$$

- **di,j** **distance yg dicari**
- **d** **: distance**
- **C** **: centroid**
- **V** **: instance**
- **i** **: status cluster ke-i**
- **j** **: indicator ke-j**

- **Centroid Tujuan dikurangkan dengan Instance Asal (Desa Bidari Tanjung Datuk).**
- **Didapatkan Selisih jarak, yang dalam penelitian ini disebut GAP.**
- **GAP ini di sort MAX to Min untuk mencari selisih jarak tertinggi.**
- **Didapatkan Indikator Prioritas Pembangunan Desa**

Indikator	Distance	Keterangan
I23	4.82	Fasilitas buang air besar
I18	3.83	Elektrifikasi
I1	3.54	Ketersediaan TK/ RA/ BA
I4	3.23	Ketersediaan SMA sederajat
I22	2.91	Sumber air untuk mandi/cuci
I21	2.82	Sumber air untuk minum
I28	2.81	Ketersediaan angkutan umum
I27	2.75	Aksesibilitas jalan
I12	2.49	Ketersediaan apotek
I24	2.48	Ketersediaan komunikasi seluler
I29	2.23	Operasional angkutan umum
I40	2.13	Aset/kekayaan desa
I6	2.13	Ketersediaan rumah sakit bersalin
I15	1.84	Ketersediaan rumah makan/warung
I13	1.74	Ketersediaan pertokoan/minimarket
I5	1.68	Ketersediaan rumah sakit
I26	1.56	Lalulintas dan kualitas jalan
I14	1.44	Ketersediaan pasar
I39	1.27	Otonomi desa
I38	0.79	Kelengkapan pemerintahan desa
I25	0.75	internet & pengiriman pos/barang
I36	0.48	Ketersediaan fasilitas olahraga

Bidari Tanjung Datuk (Riau) Distance

Indikator	Distance	Keterangan
I17	0.41	Ketersediaan bank
I37	0.39	Keberadaan kelompok kegiatan olahraga
I16	0.18	Ketersediaan hotel/penginapan
I33	-0.10	Biaya transportasi kekantor bupati
I31	-0.16	Biaya transportasi kekantor camat
I41	-0.19	Kualitas SDM kepala desa
I10	-0.23	Ketersediaan tempat praktek bidan
I11	-0.23	Ketersediaan poskesdes atau polindes
I35	-0.28	Penanganan gizi buruk
I8	-0.30	Ketersediaan poliklinik/balai pengobatan
I19	-0.33	Kondisi penerangan di jalan utama
I34	-0.43	Penanganan kejadian luar biasa
I2	-0.47	Ketersediaan SD sederajat
I32	-0.52	Waktu transportasi kekantor bupati
I20	-0.54	Bahan bakar untuk memasak
I9	-0.56	Ketersediaan tempat praktek dokter
I30	-1.23	Waktu transportasi kekantor camat
I3	-1.29	Ketersediaan SMP sederajat
I7	-1.40	Ketersediaan puskesmas

Model evaluasi/ pengukuran

- **Model evaluasi untuk mengukur / mensimulasi hasil intervensi pembangunan desa**

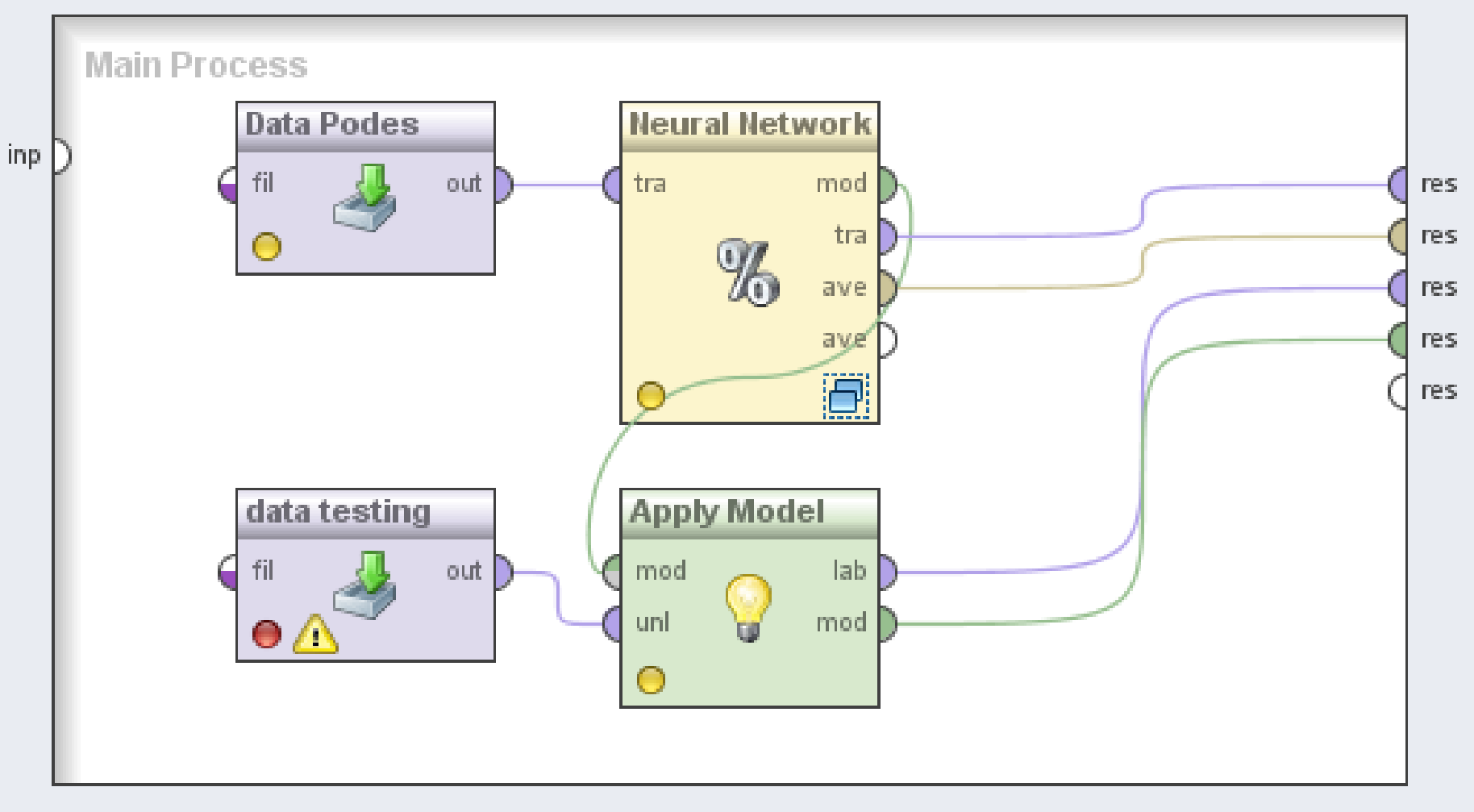

Model evaluasi / simulasi menggunakan Neural Network

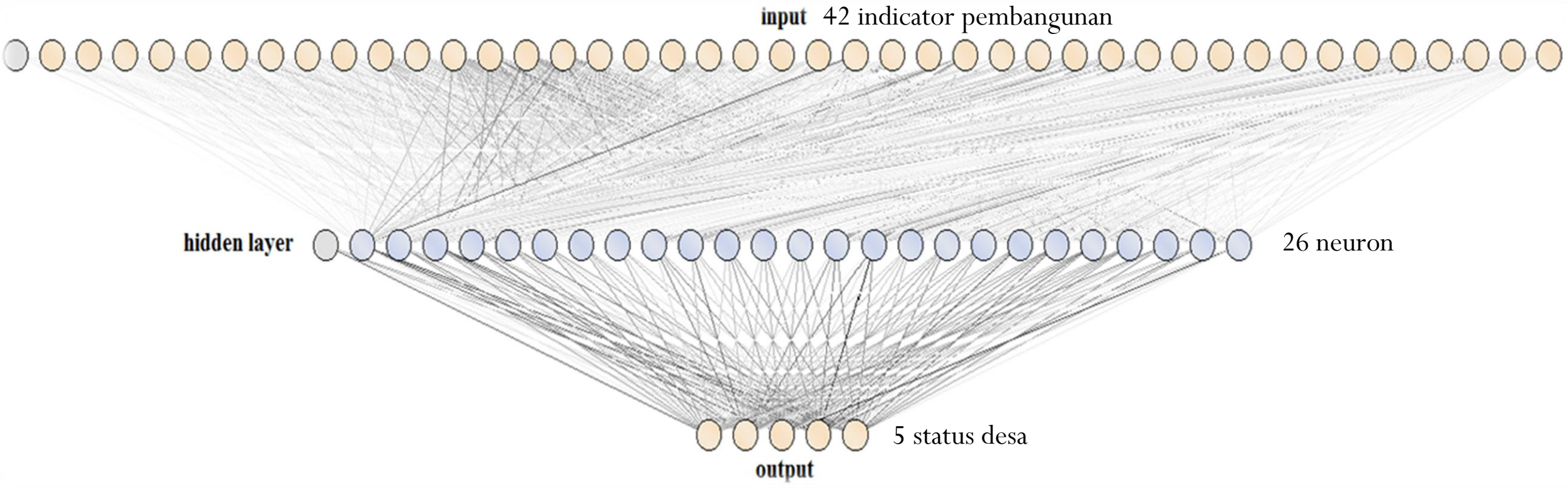

accuracy: 96.44% +/- 0.92% (mikro: 96.44%)

	true Tertinggal	true Berkembang	true Maju	true Sangat Tertinggal	true Mandiri	class precision
pred. Tertinggal	350	2	3	6	3	96.15%
pred. Berkembang	1	610	5	7	9	96.52%
pred. Maju	2	5	517	6	11	95.56%
pred. Sangat Tertinggal	3	7	4	316	0	95.76%
pred. Mandiri	1	5	8	0	591	97.69%
class recall	98.04%	96.98%	96.28%	94.33%	96.25%	

Hasil Evaluasi / Simulasi
Desa Bidari Tanjung Datuk (Riau)

- **Ketika yang dibangun I1 (Ketersediaan TK), I4 (Ketersediaan SMA) dan I18 (Elektrifikasi), status desa tetap berstatus Desa Tertinggal**
- **Ketika yang dibangun I1, I4, I18, I27 (Aksesibilitas jalan) dan I28 (Angkutan Umum) status desa berubah menjadi Desa Berkembang**
- **Ketika yang dibangun I1, I4, I18, I27 , I28, I21 (Sumber air minum), I22 (Sumber air Mandi/cuci) dan I23 (Fasilitas buang air besar) , status desa berubah menjadi Desa Mandiri**

Hasil Evaluasi / Simulasi
Desa Ulak Patian (Riau)

- **Ketika yang dibangun I28 (Ketersediaan angkutan umum), dan I29 (Operasional angkutan umum), status desa tetap berstatus Desa Tertinggal**
- **Ketika yang dibangun I28, I29 dan I20 (Bahan bakar memasak) status desa berubah menjadi Desa Berkembang**
- **Ketika yang dibangun I20, I28, I29, I21 (Sumber air minum), I22 (Sumber air Mandi) dan I23 (Fasilitas buang air besar) , status desa berubah menjadi Desa Mandiri**

Hasil Evaluasi / Simulasi
Desa Sokoi (Riau)

- **Ketika yang dibangun I18 (Elektrifikasi), I19 (penerangan jalan utama) dan I27 (Aksesibilitas jalan), status desa berubah menjadi Desa Berkembang**
- **Ketika yang dibangun I18, I19, I27 dan I20 (Bahan bakar memasak), status desa berubah menjadi Desa Maju**
- **Ketika yang dibangun I18, I19, I20, I27 , I21 (Sumber air minum), I22 (Sumber air Mandi/cuci) dan I23 (Fasilitas buang air besar) , status desa berubah menjadi Desa Mandiri**

DASAR HUKUM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 19 Huruf B tentang Kewenangan Lokal Skala Desa

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kewenangan lokal berskala Desa" adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

UU Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

a) air bersih berskala Desa;
b) sanitasi lingkungan;
c) jambanisasi;
d) mandi, cuci, kakus (MCK);
e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;

BAB II
Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Terima
Kasih